

BAB II

HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MYANMAR DARI MASA SEBELUM TRANSISI POLITIK DARI REZIM MILITER

Indonesia dan Myanmar pada dasarnya merupakan dua negara yang memiliki sejarah kedekatan hubungan bilateral yang dapat dikatakan cukup Panjang. Hubungan antara Indonesia dan Myanmar menjadi sangat signifikan ketika kedua negara sama-sama berupaya dalam meraih kemerdekaan dari para penjajah pada tahun 1940an. Dalam hal ini sebagai negara yang berada dalam wilayah Kawasan yang sama, maka keterlibatan hubungan antara kedua negara ini pun tidak dapat dihindari. Selama perjalanannya, hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar telah ditandai oleh berbagai peristiwa serta kondisi yang melatarbelakangi terjalinannya kedekatan antara kedua negara di bawah masa kepemimpinan yang berbeda.

Bab ini akan membahas mengenai perjalanan sejarah hubungan Indonesia dan Myanmar dari masa kemerdekaan hingga pada masa orde baru. Berbagai peristiwa-peristiwa yang menandai kedekatan hubungan kedua negara sebelum masa transisi politik kedua negara dimulai.

A. Sejarah Hubungan Indonesia dan Myanmar Pada Masa Kemerdekaan

Hubungan kedekatan antara Indonesia dan Myanmar telah terjalin sejak awal masa kemerdekaan Indonesia dimana pada saat itu Myanmar bahkan belum meraih kemerdekaannya dari Inggris. Hubungan baik ini mulai terjalin pada 30 Oktober 1946 saat Jenderal Aung San, yang menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara Burma mengirimkan kawat kepada Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir *“Isi kawat memberikan arti bahwa adanya harapan untuk terciptanya kerjasama yang*

sangat erat antara Birma dan Indonesia serta negara-negara lain di Asia Tenggara, demi terciptanya perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Selanjutnya, dia berharap agar wakil-wakil Indonesia yang akan menghadiri konferensi Pan Asia di New Delhi tahun depan bersedia untuk berkunjung di Birma” (Pramoedya Ananta Toer, Koeslah Soebagyo Toer, Ediati Kamil, 1946). Kemudian pada tahun 1947 delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir menghadiri acara Inter-Asian Relations Conference di New Delhi, India, pada 27 maret-2 April. Setelah menghadiri konferensi tersebut Sutan Sjahrir dan rombongan pun melakukan lawatan ke Rangoon, Burma dan bertemu dengan Perdana Menteri U Nu.

Kunjungan Indonesia ini menunjukkan indikasi positif dari pemerintah Indonesia terhadap undangan yang sebelumnya dikirimkan oleh Jenderal Aung San. Dan ketika pada tahun 1949 Belanda melancarkan serangan agresi militer kedua terhadap Indonesia, Burma kemudian merespon dengan mengusulkan untuk diadakannya Conference on Indonesia di New Delhi, India, 20 Januari 1949 yang bertujuan untuk membahas mengenai dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertemuan ini kemudian dihadiri oleh 18 negara Asia yang turut memberikan dukungan positif terhadap Indonesia untuk meraih kemerdekaan sepenuhnya dari Belanda. (Nugroho, 2016)

1) Peran Indonesian Airways dalam hubungan Indonesia dan Myanmar

Pada tahun yang sama yaitu 1947, Indonesia membuka Indonesian Office atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon. Kantor ini yang terlibat dalam mengurus perizinan agar pesawat RI-001 Seulawah dapat beroperasi di Burma sebagai penerbangan sipil pertama yang dikenal sebagai *Indonesian Airways*. Pada mulanya pemerintah

Indonesia membeli pesawat angkut Dakota DC-47 dengan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat Aceh. Pesawat ini kemudian dijadikan sebagai pesawat kepresidenan dan diberi nomor registrasi RI-001 dan dinamakan Seulawah yang memiliki arti gunung emas untuk menghormati rakyat Aceh yang telah memberikan sumbangan. Pesawat ini pun digunakan untuk menembus blockade Belanda untuk melakukan penyelundupan senjata, peralatan komunikasi seperti radio, dan obat-obatan yang diberikan oleh Burma ke Pangkalan Udara Blangbintang dan Loknga, Aceh. Sebagai bentuk dukungan Myanmar terhadap Indonesia dalam melawan agresi militer kedua Belanda pada 1949. Kemudian pesawat ini kemudian juga digunakan oleh pemerintah Myanmar yang pada saat itu membutuhkan pesawat angkut untuk operasi memadamkan pemberontakan golongan kiri yang tergabung ke dalam The White Flag People Volunteers Organization dan golongan ekstrem kanan, suku Karen di Perbukitan, dikarenakan kedudukan para pemberontak yang sangat sulit dicapai dengan jalan darat, maka yang sangat dibutuhkan pada saat itu ialah transportasi udara. Sehingga pada 26 Januari 1949, pesawat RI-001 Seulawah diterbangkan dari Kalkuta menuju Rangoon, Burma yang dibawa oleh pilot Kapten James Maupin, Kopilot Sutardjo Sigit, operator radio Sumarno dan teknisi Wallace Casselbery. (Soewito, Nurliana, & Suhartono, 2008)

Berkat kontribusi pihak Myanmar, pesawat RI-001 Seulawah mendapat izin terbang dan izin usaha dengan nama badan usaha *Indonesian Airways*. Dengan kantor dan mess para awak yang terletak di Thamwee Road 30, Rangoon yang kemudian dijadikan sebagai kantor perwakilan Republik

Indonesia di Myanmar. Pesawat RI-001 Seulawah kemudian disewa oleh Union of Burma Airways dan berada di bawah wewenang skadron Angkatan Udara Myanmar. Pesawat ini tidak hanya digunakan untuk membawa barang-barang logistik, tantara, namun juga membawa pemimpin Myanmar dengan mengenakan tarif sebesar 10 Rupee per mil. Para pemimpin negara tersebut diantara lain, Perdana Menteri Thakin Nu, Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Bo Ne Win, Menteri Pertahanan U Win, Menteri Penerangan Myanmar U Tan Pa, hingga Menteri Pendidikan dan Direktur Penerbangan Sipil Bo Se Cha dalam beragam agenda perjalanan dan inspeksi dan konsolidasi.

Selama berada di bawah tanggung jawab pemerintah Myanmar, seringkali pesawat RI-001 Seulawah jadi sasaran tembak senapan mesin hingga serangan Meriam penangkis serangan udara milik pemberontak Karen di perbatasan Myanmar-China yang disinyalir disokong oleh CIA (Badan Intelejen Amerika Serikat). Serangan tembakan tersebut bukan hanya bersarang di bagian pesawat. Bahkan awak operator radio yang berasal dari Indonesia, Sumarno ikut tertembak. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat Indonesia untuk terus mendukung Myanmar, Indonesian Airways bahkan kembali menambah satu armadanya yang diberi nama Dakota C-47 dengan nomor registrasi RI-007 yang dibeli dari Hong kong. Akibat adanya tambahan awak pesawat, mess dan kantor Indonesian Airways pindah ke Ady Road 6. Mess dan kantor itu dijuluki “The Eagle’s Nest” atau Sarang Rajawali. Di samping itu keuntungan Indonesian Airways tidak hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara tapi juga dapat membiayai Pendidikan para kadet AURI di India dan Filipina.

Lalu pada akhir tahun 1949 Indonesian Airways berhenti beroperasi di Myanmar setelah terjadi Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda dan pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Seluruh Unit pesawat kemudian dipulangkan dan tiba di pangkalan Udara Andir, Bandung pada 3 Agustus 1950, namun setelah Sembilan hari kepulangan rombongan pesawat RI-001 Seulawah di Indonesia, pemerintah Myanmar kemudian mengirimkan surat tagihan pajak. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa Indonesian Airways masih memiliki hutang sebesar 235-475 ribu Rupee selama beroperasi di Myanmar sepanjang tahun 1949, jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan harga satu unit pesawat Dakota. Menganggapi surat tersebut KSAU Komodor Suryadi mengirim surat balasan kepada Jenderal Ne Win yang berisi permohonan keringanan hutang pajak, dan sebagai gantinya menawarkan pesawat RI-007 untuk dijadikan pembayaran hutang Indonesian Airways kepada pemerintah Myanmar. Namun seperti yang telah diketahui bahwa harga pesawat RI-007 harga berkisar 190 ribu Rupee dan masih belum cukup untuk melunasi hutang pajak Indonesian Airways. Hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Myanmar menjadi pertimbangan yang kuat bagi Jenderal Ne Win yang kemudian membuatnya untuk mengabulkan permohonan keringanan dan penyelesaian hutang pajak tersebut.

2) Kunjungan Kepala Negara Indonesia Presiden Soekarno

Pada Januari 1950 Presiden Soekarno melakukan kunjungan luar negeri pertama dengan mengunjungi India, Pakistan dan Myanmar. Di

samping memperat hubungan dengan negara-negara sahabat, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia Internasional. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ketiga negara yang dikunjungi Presiden Soekarno merupakan negara-negara yang telah memberikan banyak kontribusi dan bantuan pada masa yang paling sulit yang dialami oleh Indonesia saat memperjuangkan kemerdekaanya. Lalu pada 24 Januari – 2 Februari 1950 Presiden Soekarno memulai kunjungan luar negerinya tersebut dan setibanya di Rangoon, Burma, Soekarno disambut langsung oleh Presiden Myanmar Sao Shwe Thaik (Halim & Lumintaintang, 1984). Tak berselang lama dari kunjungan ini, pada April 1950 kantor perwakilan RI yang dipimpin Maryunani diresmikan menjadi KBRI Rangoon lalu diikuti dengan diresmikannya Kedubes Myanmar di Jakarta. Kedekatan Indonesia dan Myanmar kemudian berlanjut ketika kedua negara yang sama-sama memiliki status sebagai mantan wilayah jajahan, berkontribusi secara aktif dalam menentang imperialisme dan kolonialisme. Di antaranya bersama India, Pakistan dan Sri Lanka, menjadi pemrakarsa Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955.

B. Hubungan Indonesia dan Myanmar pada masa orde baru

Para jenderal yang menjalankan pemerintahan Myanmar melalui *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) pada dasarnya memrintah dengan tangan besi, pemerintah sering kali melanggar HAM dan mengambil alih kekuasaan secara ilegal bahkan telah melanggar standard system otoriter legal yang dimiliki negara. Maka tidak mengherankan apabila SLORC tidak meraih dukungan

publik; pada pemilu terakhir pada 27 May 1990, SLORC bahkan tidak berhasil memenangkan sebagian besar kursi di parlemen. Namun SLORC masih tetap meyakini bahwa hanya mereka lah yang dapat menjadi penyelamat bagi negara. Walaupun secara bersamaan SLORC juga menyadari bahwa mayoritas dari warga negara yang mereka dominasi tidak menginginkan untuk diselamatkan oleh para jenderal tersebut. Hal ini kemudian mendorong SLORC untuk melihat ke berbagai contoh sistem dimana rezim militer dapat melindungi posisinya sebagai pemimpin negara dan secara bersamaan menikmati toleransi dan dukungan dari sebagian besar penduduk. (Sundhaussen, Indonesia's New order: A model for Myanmar, 1995)

Hingga akhirnya yang menarik perhatian pemerintah Myanmar ialah Rezim militer Indonesia di bawah pimpinan jenderal Soeharto. Berkuasa sejak 1967, Jenderal Soeharto selama masa kepemimpinannya yang cukup lama secara signifikan meningkatkan standard hidup mayoritas penduduk Indonesia, sementara militer mengambil alih kekuasaan negara. Namun tidak ada kesalahpahaman mengenai tentara Indonesia yang menjadi pilar utama rezim militer dan peran penting yang akan dimainkannya bahkan pasca rezim Soeharto runtuh. Oleh karena itu untuk mendapatkan kesan pertama secara langsung dari militer rezim militer Indonesia, delegasi besar yang dipimpin oleh sekretaris pertama SLORC, Liutenant General Khin Nyunt, mengunjungi Indonesia pada Desember 1993. Menurut Menteri Luar negeri Indonesia pada saat itu Ali Alatas, para tamu dari Myanmar secara jelas mengatakan bahwa tujuan utama yang membawa mereka ke Indonesia ialah untuk mempelajari *dual function military* (baik pasukan pertahanan maupun politik) dari angkatan bersenjata Indonesia, serta bagaimana model *dual function* diakomodasikan ke dalam konstitusi negara. Tampaknya masuk akal bagi SLORC dalam mencari format politik,

untuk merubah model menjadi seperti rezim Soeharto dengan track recordnya yang terbukti. (Sundhaussen, 1982)

Model peran politik yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia (ABRI) terjadi pada masa pemerintahan orde baru Jenderal Soeharto. Pemerintah resmi Indonesia pada dasarnya tidak pernah lelah untuk mengatakan bahwa orde baru bukan lah rezim militer. Dan walaupun Soeharto adalah prajurit aktif militer ketika ia menjadi presiden, Soeharto meraih kekuasaannya melalui proses konstitusional, dan secara tetap dipilih kembali oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang melantik presiden dan wakil presiden. Pada gilirannya kemudian banyak prajurit militer (TNI) yang pensiun dari jabatannya dan diangkat menjadi anggota kabinet dalam birokrasi negara. Namun dalam sistem presidensial, kepala badan eksekutif berhak untuk menentukan anggota kabinet dari berbagai kalangan dan sudah sangat lumrah bahwa presiden Soeharto memilih banyak staff kabinet yang terdiri dari orang-orang yang mengetahui kehidupannya dengan baik, yaitu dalam hal ini para perwira tentara.

Sepanjang sejarahnya, tentara di Indonesia telah menahan diri untuk terlibat penuh dalam dunia politik. Pihak Militer memang pernah membentuk pemerintahan berbasis militer pada tahun 1948 namun setelah pemerintah sipil menyerahkan diri kepada pasukan Belanda. TNI kemudian menyerahkan kembali kekuasaan kepada rakyat Indonesia pasca perang untuk meraih kemerdekaan telah usai, dan di bawah pimpinan mantan pasukan yang secara khusus dilatih oleh Belanda yang berubah menjadi pejuang kemerdekaan, kemudian mendukung terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Hanya ketika sistem parlementer runtuh dari dalam pada tahun 1958, pada saat itu komandan pasukan militer, Mayor Jenderal A.H. Nasution, mengumumkan konsep jalan tengahnya: Tentara harus memainkan peranan politis, namun tidak boleh mengambil

alih kekuasaan politik. Nasution kemudian turut bergabung dalam aliansi sipil presiden Soekarno dalam rangka menciptakan sistem politik yang baik di Indonesia. Konsep *middle way* yang ditawarkan Nasution ini pun beberapa dekade kemudian telah dikembangkan oleh Jenderal Soeharto menjadi *dual function* atau dwi fungsi ABRI. Selama masa pemerintahannya pembuatan segala keputusan pada dasarnya tidak secara kolektif dilakukan oleh junta militer, melainkan semua keputusan berpusat kepada Soeharto. Sehingga dapat dikatakan bahwa masa orde baru bersifat lebih personal jika dibandingkan dengan rezim militer pada umumnya.

1) Kesamaan antara Indonesia dan Myanmar

Indonesia dan Myanmar pernah diokupasi oleh Jepang pada masa perang dunia ke dua, dan keduanya kemudian bekerjasama dengan Jepang untuk mengamankan kemerdekaanya dari penjajah Eropa. Namun di Myanmar, pasukan militer di bawah pimpinan Jenderal Aung San berpindah kembali ke pihak Inggris pada masa akhir perang untuk mendukung pendudukan kembali Inggris ke dalam negara tersebut, sementara di Indonesia pasukan khusus yang dilatih oleh Jepang (PETA) telah dilucuti ketika perang berakhir. Banyak dari anggota PETA yang kemudian turut terlibat dalam melawan Belanda pada perang gerilya yang berakhir pada 1949.

Tentara di Myanmar (*tatmadaw*) di bawah Aung San yang terbunuh sebelum Myanmar meraih kemerdekaan, secara resmi diberikan oleh Inggris, secara jelas merupakan kekuatan nasional yang dominan. Dalam kasus Indonesia. Presiden Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta merupakan masyarakat sipil sehingga kontrol mereka terhadap angkatan bersenjata sangat lemah. Tentara Nasional

Indonesia (TNI) umumnya akan menyelenggarakan pertemuannya sendiri tanpa arahan dari pemerintah dan menyerahkan kesetiannya terhadap pemimpin karismatik yaitu, Jenderal Sudirman. Terutama pada tahun 1948 ketika pemerintah menaruh harapan besar terhadap TNI dalam melanjutkan perang melawan Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda.

Baik di Myanmar dan Indonesia, perjuangan dalam meraih kemerdekaan dan kemudian diikuti dengan banyaknya konflik internal dalam mempertahankan kesatuan nasional membuat pihak militer melihat dirinya sebagai “penyelamat” bagi negara yang mereka masing-masing sehingga mereka merasa berhak untuk memainkan peran aktif dalam menentukan takdir dari negara mereka sendiri. Di Myanmar Jenderal Ne Win membentuk pemerintah pada tahun 1958 ketika pemerintah sipil yang berbasis demokrasi parlementer saat itu telah bubar. Di Indonesia pada waktu yang hampir bersamaan, TNI juga membentuk aliansi politik bersama presiden Soekarno. Sementara itu “*guided democracy*” di bawah pimpinan seorang megalomaniak seperti Soekarno menghasilkan penurunan ekonomi yang drastis dan polarisasi kekuatan sosial.

Pada akhir tahun 1965, terjadi ledakan konflik internal dalam negeri Indonesia yang menyebabkan ratusan dari ribuan anggota kelompok komunis mengalami pembantaian yang dilakukan oleh pemuda muslim, militer, kelompok hindu, protestan bahkan kelompok nasionalis sekuler dan sosialis juga turut mengambil andil dalam pembantaian tersebut. pada tahun 1966-1967 presiden Soekarno kemudian diturunkan dari jabatannya dan secara bertahap Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan sebagai presiden Republik Indonesia. Di Myanmar Jenderal

Ne Win secara unilateral meintervensi kembali pada 1962 dan hingga saat ini pemerintahan rezim militer masih menguasai sistem politik negara. Di kedua negara militer memasuki dunia politik secara bertahap dan mengontrol penuh negara ketika pemimpin sipil terlihat tidak mampu untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Selain itu salah satu persamaan utama lainnya antara kedua negara ialah, baik Indonesia maupun Myanmar terdiri dari masyarakat multietnis dan terdapat satu etnis yang mendominasi. Di Myanmar diperkirakan sekitar setengah dari jumlah populasi penduduk yang mencapai 43 juta merupakan etnis Burma. Sementara lebih dari 100 kelompok etnis lainnya menetap di wilayah pegunungan seperti Karen, Karenni, Shan, Mon, Arakanis, Chin dan Kachin yang merupakan beberapa kelompok terbesar dan secara politis sangat penting. Di Indonesia terdapat sekitar 45% dari total jumlah populasi merupakan kelompok etnis Jawa, dengan lebih dari 600 kelompok etnis lainnya yang tersebar di seluruh negeri.

Pada masa pra-kolonial konflik antara etnis merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi di kedua negara. Dan bagi sebagian dari kelompok etnis yang lebih kecil menganggap bahwa kolonialisme membawa perlindungan atas ancaman dari kelompok etnis yang lebih besar. Berbagai permasalahan internal ini kemudian yang menyebabkan militer memainkan peranan utama dalam negeri dan di tengah-tengah perbedaan etnis di masing-masing negara yang menyulut berbagai konflik. Namun seiring berjalannya waktu keadaan politik dan situasi militer di kedua negara mengalami perbedaan yang mengantarkan pada perbedaan demokratisasi yang terjadi di kedua negara.

2) **Kunjungan Soeharto ke Myanmar dan Ne Win ke Jakarta**

Hubungan baik antara Indonesia dan Myanmar tetap terjalin meski Myanmar pada saat itu telah diubah menjadi negara sosialis hal ini dibuktikan dengan kunjungan yang dilakukan oleh pemimpin negara Indonesia pada saat itu yaitu Presiden Soeharto yang bertamu ke Myanmar pada 26 November 1972, 26-29 Agustus 1974, dan 21-23 Februari tahun 1997 (kbri) kunjungan ini juga menjadi salah satu faktor lain kedekatan Indonesia dan Myanmar (Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon, 2007). Lebih tepatnya terkait hubungan bisnis yang dilakukan oleh keluarga Cendana di Myanmar. Peluang terjalinnya kerjasama yang baik ini muncul ketika banyak perusahaan multinasional Barat yang berhenti beroperasi di Myanmar diakibatkan oleh protes dari penduduk negara-negara Barat tersebut yang menentang negaranya dalam melakukankerjasama dengan Myanmar yang diketahui dipimpin oleh rezim otoriter anarkis. Beberapa bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto di Myanmar meliputi; Pada Agustus 1991 PT Indomiwon Citra Inti mulai mengekspor 70 ton monosodium glutamate ke Myanmar, Vietnam dan Hong Kong. Kemudian pada 1993 perusahaan milik keluarga Presiden Soeharto, PT Elektrindo Nusantara menjadi mitra kerjasama Angkatan Udara dan Departemen Luar Negeri Thailand, dan pada tahun 1997 perusahaan ini telah membangun jejaring telepon bagi 256 pelanggan di Yangon, Myanmar. Lalu pada tahun 1996, Hashim Djojohadikusumo menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan perusahaan negara Myanmar, Union of Myanmar Economic Holding Limited, guna

membangun pabrik semen yang memiliki volume produksi sebesar 1 juta ton per tahun. Kemudian selama kunjungan Presiden Soeharto ke Myanmar pada tahun 1997 telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kepala junta militer Jendral Than Swee. Namun menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998, hubungan kerjasama ini pun mengalami kemunduran. (Jusuf, 2017)

Selanjutnya kunjungan lain juga datang dari Myanmar. Yaitu, ketika Ne Win berkunjung ke Jakarta atas undangan pribadi Presiden Soeharto pada tahun 1997. Kedatangan Ne Win ke Jakarta mengindikasikan adanya kepentingan Presiden Soeharto di balik pertemuan ini, dimana Presiden Soeharto memanfaatkan momen ini untuk melakukan pendekatan dengan Ne Win guna mempengaruhi Jenderal-Jenderal yang berada di SLORC. Selain itu kedatangan Ne Win ke Indonesia juga untuk memperkuat ikatan Myanmar dengan Indonesia yang telah dianggap sebagai “saudara tua” Myanmar. Kepentingan lain yang dibawa oleh Ne Win ialah agenda untuk memperkuat hubungan antara ABRI dengan SLORC seiring untuk melihat secara langsung keberhasilan pembangunan Indonesia di bawah pimpinan rezim militer Soeharto (Harsono, 1997)